

**PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA OLEH PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN TUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KOTO CERENTI KECAMATAN  
CERENTI TAHUN 2016)**

**Oleh:**

**Della Puspita**

Email: [Ajha\\_della@yahoo.com](mailto:Ajha_della@yahoo.com)

**Pembimbing:** Dr. H. Ali Yusri, MS  
Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761 – 63277

**Abstract**

*Development of Village Community Institutions (LKD) aims to improve community capacity in institutions, increase community participation in rural development, empower communities in all aspects of life, improve the welfare of the community and realize quality families. The Community Empowerment Institute (LPM) is a partner institution of the Village and Sub-District Governments in the aspects of planning, implementation and control of community-based development. The formulation of the problem in this research is how the Village Community Institutional Development by Kuantan Singingi Regency Government towards Community Empowerment Institution in Koto Cerenti Village and its obstacles.?*

*The purpose of this research is to know the guidance by the Local Government of Kuantan Singingi Regency against Community Empowerment Institution in Koto Cerenti Village and the obstacles of Local Government of Kuantan Singingi Regency in fostering Community Empowerment Institution of Koto Cerenti Village.*

*The conclusion of this study is Based on the results of research that has been done on the Development of Village Social Institutions By Local Government of Kuantan Singingi Regency (Case Study of Community Empowerment Institution in Koto Cerenti Village, Cerenti Sub-District, 2016), the researcher can conclude that the guidance done by the Local Government towards the Institute of Empowerment Society has not been maximized. Obstacles in: Lack of Budget For Development of LPM and Lack of Participation of LPM Members in following guidance given by Dinas Sosial Pemdayaan Masyarakat dan Desa.*

*Keywords: Development of Village Community Institutions*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memandatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat Desa, selain itu Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, memberdayakan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keluarga berkualitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bekerjasama dengan Pendampingan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang selama ini dibantu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang disesuaikan dengan keperluan dan suatu mitra dari Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat. Adapun tugas dari LKD adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana pembangunan secara partisipatif.
2. Sebagai pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengembangan pembangunan secara partisipatif.
3. Sebagai penggerak dan pengembang partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
4. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, mengembangkan kemitraan, memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adapun jenis-jenis lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW)
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4. Karang Taruna
5. Lembaga Adat
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat.

Menurut pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa adalah :

1. Memberdayakan masyarakat desa dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
2. Menggerakkan swadaya gotong royong

Melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Dengan keberadaan LPM di tengah masyarakat yang dirasa begitu sangat penting maka Pemerintahan Desa Koto Cerenti membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang mana anggotanya terdiri dari warga masyarakat yang dianggap cakap dan sekaligus tokoh atau pemuka di tengah-tengah masyarakat dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 kali pada masa jabatan berikutnya, anggota LPM Koto Cerenti dibentuk melalui musyawarah masyarakat desa. LPM terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksinya.

Namun kenyataan dilapangan sampai saat ini, keberadaan LPM khususnya di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal. Karena kurangnya minat dari pengurus LPM tersebut dalam menjalankan tugasnya masing-masing, kemudian minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk honor pengurus LPM, dan kurangnya bimbingan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

sehingga dapat memicu kurang optimalnya kinerja LPM.

Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan masalah, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih jauh, dengan mengemukakan judul : “Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Tahun 2016).”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Koto Cerenti?
2. Apa saja hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Membina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti?

## **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koto Cerenti dan hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diterima selama masa kuliah, serta sebagai ilmu yang sangat berharga dalam menambah pengetahuan
- b. Dapat memberikan informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori

yang terkait dengan masalah penelitian ini.

#### **1.4 Kerangka Teoritis**

##### **1.4.1 Studi Terdahulu**

Studi terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini adalah:

Eka Hadinur S dengan judul Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa 2010-2011 (Study Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci). Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran atau kemauan dari aparat pemerintah desa dan LPM dalam upaya kerjasama yang ideal, pemerintah desa dan LPM masih mementingkan kepentingan masing-masing sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Muhammad Galuh K P dengan judul Peran Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Desa Krambilawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari Terjadi hambatan serta tantangan yang menghadang LPMD dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Edy Kurniadi dengan judul Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun. (Studi Pada Desa Sawang Laut Dan Desa Gemuruh) Tahun 2013. Hal ini dilihat dari Bagaimana cara BPMPD dalam memberdayakan masyarakat pedesaan di kecamatan kunder.

##### **1.4.2 Pembinaan**

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup

tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Menurut pendapat Santoso S. (1995:52) yang mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pemberian bimbingan
- c. Memberikan pengarahan
- d. Memberikan pendidikan dan pelatihan

Selanjutnya, Mitha Thoha (2003:46), Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

##### **1.4.3 Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Depdiknas, (2003:44) Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.

Menurut Koentjaraningrat (2009:45). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut Sadan (1997:67) Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.

Menurut Mubarak (2010:33) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai

dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia.

Menurut Soetomo (2006:35) Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.

#### **1.4.4 Pengertian Pemerintah Daerah**

Menurut Inu Kencana Syafie (2005:21-22). Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Menurut C.F. Strong sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie (2005:22): *Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of making law, thirdly financial power of the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending*

*of state and of enforcing the law it makes on the state behalf.*

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comperative Government* sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie, (2005:3-4) :1)menyatakan bahwa istilah *government*, paling sedikit mempunyai empat arti menunjukkan kegiatan atas proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atau pihak lain (*the activity or the process of roverning*). 2)menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau proses dijumpai (*states of affairs*).3)menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people changed with the duty of governing*). 4)menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by witch a particular society is governed*).

### **1.7 Metode Penelitian**

#### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Burhan Bungin (2009: 68) tujuan utama penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

#### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Koto Cerenti tersebut karena kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut kurang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian mendalam tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Koto Cerenti

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

### 1.7.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa wawancara mendalam dan observasi.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Tahun 2016).

### 1.7.4 Sumber Data

- a. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami dan lebih berpengalaman mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel purposive. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:131) sampel purposive ialah sebagian atau wakil populasi yang akan teliti.

- b. Dokumen

Selain informan penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen resmi sebagai data, dokumen ini merupakan data yang akurat dan dapat dipercaya yang penulis dapatkan langsung dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Struktur Organisasi LPM, RPJM-Desa Koto Cerenti Tahun 2015-2020, dll.

### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut (Sugiyono, 2005:156).

- a. Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan.

Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Tahun 2016).

Dalam kegiatan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang diamati.

- b. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto, kegiatan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2005:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri,

baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variable satu dengan variable yang lain.

Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada saat ini dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran.

## HASIL PENELITIAN

### 3.1 Pembinaan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap LPM Desa Koto Cerenti

#### 3.1.1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sehingga kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktifitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi.

Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan

rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah membuat rencana kerja sebagaimana yang dimuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mana Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai wewenang salah satunya yaitu membina LPM yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3. Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Kegiatan/Program	Indikator Kinerja
1.	Peningkatan kapasitas pengurus LPM	Meningkatnya kapasitas pengurus LPM
2.	Kinerja LPM	Meningkatnya kinerja pengurus LPM
3.	Fasilitasi LPM	Terlaksananya fasilitas LPM
4.	Lomba LPM berprestasi tingkat Kecamatan	Terpilihnya LPM berprestasi

*Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2016*

Berikut wawancara dengan Bapak Darusman Ismar selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan bahwa:

*"sudah ada perencanaan yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terhadap LPM, adapun rencana yang dibuat: Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM, Meningkatkan Kinerja LPM, Fasilitasi LPM Desa/Kabupaten, Lomba LPM berprestasi*

tingkat Kecamatan. (Wawancara dengan Bapak Darusman Ismar, tanggal 27 Agustus 2017).”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Hendri selaku Ketua LPM Desa Koto Cerenti mengatakan bahwa:

“Adanya rencana kerja yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk LPM ini dalam meningkatkan kualitas kinerja LPM, rencana kerja yang telah dibuat disosialisasikan terhadap LPM, agar nantinya diharapkan LPM dapat mewujudkan rencana kerja dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. (Wawancara dengan Bapak Hendri, tanggal 20 Agustus 2017).”

### 3.1.2. Pemberikan Bimbingan

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana.

Berikut wawancara dengan Bapak Khairudin selaku Sekretaris LPM Desa Koto Cerenti mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tidak ada memberikan bimbingan khusus terhadap LPM Desa Koto Cerenti. (Wawancara dengan Bapak Khairudin, tanggal 22 Agustus 2017).”

Kemudian menurut pendapat Bapak Hendri selaku Ketua LPM Desa Koto Cerenti mengatakan bahwa:

“Apa yang dikatakan oleh Sekretaris LPM itu memang benar kami memang tidak pernah diberikan bimbingan, saya pribadi selaku Ketua LPM ingin sekali LPM didesa ini dibimbing agar LPM didesa kita ini bisa berjalan efektif dan bisa menjalankan tugas dan fungsi kami dengan baik karena kami merupakan organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan

masyarakat. Kami juga ingin Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa anggaran khusus untuk gaji pengurus LPM Desa Koto Cerenti. karena selama ini kami hanya menerima bantuan dana dari pemerintahan desa saja dan itupun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan LPM. (Wawancara dengan Bapak Hendri, tanggal 20 Agustus 2017).”

### 3.1.3 Memberikan Pengarahan

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai perencanaan dari yang memberikan pengarahan, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien.

Pengarahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terhadap LPM Desa Koto Cerenti. Pemberian arahan yang baik membuat pekerjaan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menjadi baik.

Berikut wawancara dengan Bapak Darusman Ismar selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mengatakan bahwa:

“Pembinaan seperti pemberian pengarahan belum optimal kami selenggarakan, tetapi ketika ada kegiatan rapat-rapat di Kecamatan kami juga menyampaikan pengarahan terhadap LPM agar LPM tersebut bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk membantu Pemerintahan Desa. (Wawancara dengan Bapak Darusman Ismar, tanggal 27 Agustus 2017).”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Agus Supriadi selaku Sekretaris Kecamatan Cerenti mengatakan bahwa:

*“Adanya pertemuan yang kami adakan untuk membahas pembinaan seperti pemberian arahan yang dihadiri oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan memberikan pengarahannya terhadap LPM, nantinya akan mempermudah pemerintah desa dalam mengembangkan LPM. (Wawancara dengan Bapak Agus Supriadi, tanggal 5 September 2017).”*

Berikut wawancara dengan Bapak Marwadi selaku Kepala Desa Koto Cerenti mengatakan bahwa:

*Saya selaku Kepala Desa Koto Cerenti pernah mengikuti rapat dikecamatan bersama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Pada saat itu mereka pun memberikan arahan terhadap LPM yang ada di Kecamatan Cerenti dan arahan tersebut disampaikan kepada Perangkat-Perangkat Desa yang hadir pada saat itu. (Wawancara dengan Bapak Marwadi, tanggal 2 September 2017).”*

#### **3.1.4. Memberikan Pendidikan Dan Pelatihan**

Pendidikan dimaksud adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang menggunakan metode. Jadi pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan.

wawancara dengan Bapak Darusman Ismar selaku kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mengatakan bahwa:

*“Pada tahun 2016 kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melakukan pelatihan terhadap LPM yang ada di Kecamatan Cerenti tidak hanya LPM Desa Koto Cerenti tetapi seluruh LPM di Kecamatan Cerenti, kami undang semua Organisasi LPM yang ada di Kecamatan Cerenti dan kami minta kepada Kecamatan untuk menyebarkan undangan tersebut kepada LPM yang ada.*

*Kami melakukan pelatihan ini dikantor Camat Cerenti. (Wawancara dengan Bapak Darusman Ismar, tanggal 27 Agustus 2017).”*

Kemudian wawancara dengan bapak Hendri selaku ketua LPM Desa Koto Cerenti mengatakan bahwa:

*“LPM Desa Koto Cerenti pernah mengikuti pelatihan pada tahun 2016 dikantor Camat, semua LPM yang ada di Kecamatan Cerenti ini dikumpulkan dikantor Camat untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, saat pelatihan itu kami diberikan pembelajaran dari mereka tapi sayangnya pelatihan ini hanya dilakukan dua kali saja sehingga kami belum bisa menerapkan apa yang kami pelajari saat itu untuk desa kami, seharusnya pelatihan ini dilaksanakan terus menerus agar kami paham apa yang menjadi tanggungjawab kami dalam menjalankan tugas dan fungsi LPM. (Wawancara dengan Bapak Hendri, tanggal 20 Agustus 2017).”*

Kemudian wawancara dengan Bapak Marwadi selaku Kepala Desa Koto Cerenti mengatakan bahwa:

*“Benar adanya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melakukan pelatihan terhadap LPM dikecamatan Cerenti, tetapi pelatihan ini hanya satu kali saja mereka lakukan sehingga menurut saya belum optimal. (Wawancara dengan Bapak Marwadi, tanggal 2 September 2017).”*

Berikut wawancara dengan Bapak Agus Supriadi selaku Sekretaris Kecamatan Cerenti mengatakan bahwa:

*“Pada tahun 2016 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa memang benar melakukan pelatihan terhadap LPM di kecamatan Cerenti dan pelatihan tersebut dilaksanakan dikantor Camat Cerenti dan kecamatan hanya sebagai fasilitator dalam pembinaan tersebut. (Wawancara dengan Bapak Agus Supriadi, tanggal 5 September 2017).”*

### 3.2 Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina LPM Desa Koto Cerenti

#### 3.2.1 Minimnya Anggaran Untuk Pembinaan LPM

Menurut Nafarin, (2000:11) anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Pasal 16 bahwa LPM memiliki sumber dana dari APBD.

Berikut wawancara dengan Bapak Darusman Ismar selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mengatakan bahwa:

*“Kami melakukan pembinaan terhadap LPM di Kecamatan Cerenti hanya satu kali dalam setahun. Kami tidak ada melakukan pembinaan khusus terhadap LPM di desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Cerenti tetapi kami merangkup semua LPM yang ada di Kecamatan Cerenti. Sebab anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap LPM ini sangat minim sekali. (Wawancara dengan Bapak Darusman Ismar, tanggal 27 Agustus 2017).”*

**Tabel. 3.6.**  
**APBD Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap LPM Tahun 2016**

No.	Uraian	Anggaran
1.	Belanja pegawai	22.000.000.00
	- Honorer LPM	4.800.000.00
2.	Belanja barang dan jasa	23.200.000.00

	<b>Jumlah Jumlah</b>	<b>50.000.000.00</b>
	<b>h</b>	

Sumber: BAPPEDA Kab. Kuantan Singingi Tahun 2016.

#### 3.2.2. Kurangnya Partisipasi Anggota LPM

Dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada seluruh organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cerenti, LPM di Desa Koto Cerenti belum memiliki kesadaran untuk sama-sama berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam hal pembinaan untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Buktinya dalam pembinaan yang dilakukan satu kali dalam setahun hanya beberapa orang perwakilan saja yang menghadiri pembinaan tersebut. Ini tentu menjadi kendala bagi LPM dalam menyampaikan pentingnya organisasi dalam masyarakat.

Berikut wawancara dengan Bapak Darusman Ismar selaku kepala bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengatakan bahwa:

*“Pada saat pembinaan LPM berlangsung di Kecamatan Cerenti yang hadir pada saat itu sangatlah sedikit, yang hadir itu hanya perwakilan dari LPM itu sendiri, yang berjumlah paling banyak 3 orang. Harapan kami pada saat itu banyak yang hadir, ya karena pembinaan itu dilaksanakan hanya satu kali dalam setahun. (Wawancara Dengan Bapak Darusman Ismar, tanggal 27 Agustus 2017).”*

Kemudian wawancara dengan Bapak Hendri selaku Ketua LPM Desa Koto Cerenti mengatakan bahwa:

*“LPM Desa Koto Cerenti mengikuti pembinaan dikantor Camat Cerenti yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, tidak hanya LPM Desa Koto Cerenti saja yang hadir tetapi semua LPM yang ada di Kecamatan Cerenti ini. LPM Desa Koto Cerenti tidak semuanya yang dapat hadir, mungkin karena sebagian dari Pengurus LPM Desa Koto ada kesibukan masing-masing sehingga tidak bisa mengikuti*

acara tersebut. Jumlah pengurus LPM Desa Koto Cerenti pada saat itu yang hadir hanya tiga orang saja. Yaitu Ketua, Sekretaris Dan Seksi Humas. (Wawancara dengan Bapak Hendri, tanggal 20 Agustus 2017).”

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Tahun 2016) peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum maksimal. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti juga belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Seharusnya Pemerintah Daerah melakukan pembinaan satu kali dalam tiga bulan agar pembinaan tersebut berjalan maksimal.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membina LPM Desa Koto Cerenti yaitu: Minimnya Anggaran Untuk Pembinaan LPM dan Kurangnya Partisipasi Anggota LPM dalam mengikuti pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberikan saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebaiknya diharapkan mampu membina LPM diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan lebih baik.
2. LPM Desa Koto Cerenti harus mengetahui tugas dan fungsi dalam menjalankan kegiatan-

kegiatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Bungin Burhan, 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Juanda, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT Alumnii.
- Mathis Robert & Jackson Jhon, 2002. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso, 1995. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Soetomo, 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Syafie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Syaukani, Afan Gaffar & Ryas Rasyid, 2012. *Otonomi Dalam Negara Kesatuan, Cetakan Kesembilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thoha, Mifta, 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tutik, Titik Triwulan, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka

### **Peraturan :**

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  
Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5  
Tahun 2007 Tentang Pedoman  
Penataan Lembaga  
Kemasyarakatan

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor  
29 Tahun 2016 Tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas Dan Fungsi Serta Tata  
Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Masyarakat Dan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan  
Singingi Nomor 6 Tahun 2009  
Tentang Pembentukan Lembaga  
Kemasyarakatan

**Jurnal :**

Eka Hadinur S, Hubungan Pemerintah  
Desa Dengan Lembaga  
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  
Dalam Pelaksanaan Pembangunan  
Desa 2010-2011 (Study Desa Mekar  
Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci  
Kabupaten Pelalawan.

Edy Kurniadi. Jurnal Jom FISIP Volume 1  
No.2, Peran Badan Pemberdayaan  
Masyarakat Pemerintahan Desa  
(BPMPD) Melalui Program  
Peningkatan Pemberdayaan  
Masyarakat Perdesaan Di  
Kecamatan Kundur Barat  
Kabupaten Karimun (Studi Pada  
Desa Sawang Laut Dan Desa  
Gemuruh) Tahun 2013.

**Skripsi :**

Muhammad Galuh K P, Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Peran Lembaga Pemberdayaan  
Masyarakat Desa (LPMD) Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan  
Sosial Di Desa Krambilawit,  
Kecamatan Saptosari, Kabupaten  
Gunungkidul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta.